



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BERISKHAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **274130**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **775.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m²/120 m² di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah Seluas 8340 m² di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 9804 m² di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 8046 m² di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 8343 m² di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 10350 m² di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **179.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA T G02T31L0 M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	541.773.068
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.496.273.068
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.496.273.068

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.